



ABSTRAKSI

Pengelolaan dana kampanye akan mempengaruhi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan. Tulisan ini bertujuan membedah pola pendanaan kampanye kandidat pada Pilkades desa Sukorame Tahun 2019 dengan fokus pada dimensi penerimaan dan pengeluaran kandidat. Selain itu, tulisan ini akan menjelajah konsekuensi watak rezim kekuasaan yang akan lahir pasca pemilihan. Analisa dilakukan berdasarkan pada teori pendanaan kampanye, kemudian didukung oleh konsep politik programatik dan politik klientelisme dengan mengandalkan data yang didapatkan dengan metode wawancara kepada sejumlah narasumber.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pola penerimaan dana kampanye kandidat cenderung mengarah pada pola sentralistik kandidat. Sementara dari segi pengeluaran, kandidat kepala desa cenderung lebih banyak mengeluarkan dana untuk keperluan vote buying ketimbang pengenalan program dan visi-misi kepada konstituen. Penelitian ini menemukan jawaban bahwa pandanaan kandidat dalam pilkades desa Sukorame tahun 2019 menunjukkan penguatan relasi politik yang bersifat klientelistik pada satu sisi, ditambah memudarnya politik programatik pada sisi yang lain. Konsekuensinya, watak rezim yang terbentuk pasca pemilihan cenderung mengarah pada penguatan demokrasi patronase.

Kata Kunci: Pendanaan Kampanye, Pilkades, Klientelisme, Patronase



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PENDANAAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA: KLIENTELISME DAN PATRONASE DALAM KONTESTASI PILKADES

DHIMAS RAGIL SANTOSO, Dr. rer. Pol. Mada Sukmajati., S.I.P., M.P.P

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

ABSTRACT

The management of campaign funds will affect the implementation of elections with integrity and justice. This paper aims to dissect the candidate campaign funding patterns on village chief election Sukorame 2019 with a focus on the dimensions of receipts and expenditures of candidates. In addition, this paper will explore the consequences of the nature of the regime in power that will emerge after the election. The analysis was carried out based on the theory of campaign funding, then supported by the concept of programmatic politics and clientelist politics by relying on data obtained by interviewing a number of sources.

The findings in this study indicate that the pattern of receiving candidate campaign funds tends to lead to a centralized pattern of candidates. Meanwhile, in terms of expenditure, village chief candidates tend to spend more money for vote buying rather than introducing programs and vision and mission to constituents. This research found the answer that the candidates in the Sukorame village elections in 2019 showed the strengthening of clientelistic political relations on the one hand, plus the waning of programmatic politics on the other. As a consequence, the nature of the post-election regime tends to lead to the strengthening of patronage democracy.

Keywords: Campaign Funding, Village Chief Election, Clientelism, Patronage